

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan ekonomi terutama dalam bidang ekonomi makro menjadi permasalahan yang kerap kali muncul dan mengiringi perkembangan negara berkembang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara sedang berkembang sulit untuk menjadi maju. Kesamaan karakteristik negara sedang berkembang pada umumnya, tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya pun tergolong lambat. Pendapatan perkapita negara sedang berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta jumlah penduduk miskin atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

World Bank (2019) mengungkapkan bahwa terdapat empat alasan pentingnya untuk mengangkat kemiskinan sebagai isu pembangunan. Pertama, penurunan kemiskinan merupakan prioritas dalam pembangunan. Sehingga, kemiskinan harus diukur secara akurat, agar keberadaan penduduk miskin dapat dijangkau dengan lebih mudah. Kedua, agar sebaran penduduk miskin dapat diidentifikasi dengan mudah. Ketiga, sebagai bahan evaluasi terhadap program pemerintah terkait penanganan kemiskinan. Keempat, mengevaluasi efektivitas lembaga pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, karena selama ini pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat yakni

program pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar berpihak kepada lapisan yang paling miskin. Kebijakan pembangunan dan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan seringkali kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan sehingga tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu dari permasalahan ekonomi makro tersebut. Masalah kemiskinan sudah merajalela ke setiap penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan sendiri timbul akibat perbedaan kemampuan, kesempatan dan sumber daya. Negara berkembang sangat identik dengan kemiskinan bangsanya, terdapat beberapa faktor yang membuat negara berkembang tersebut untuk menjadi negara yang maju. Faktor umum yang terjadi di setiap negara berkembang adalah pendapatan nasional pada suatu negara berkembang yang rendah dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban. Faktor yang lain ada pada pendapatan perkapita dari negara berkembang tergolong rendah dan lambannya pertumbuhan ekonominya, bahkan sering terjadi stagnannya pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan pada golongan masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah serta jumlah penduduk miskin atau masyarakat yang ada pada garis kemiskinan juga menjadi faktor utama negara berkembang termasuk juga negara Indonesia.

Kekurangan uang untuk menunjang kelangsungan hidup juga dipahami sebagai kemiskinan, salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk mencukupi kebutuhan hidup seperti halnya makanan, pakaian, rumah, kesehatan dan pendidikan yang bisa diterima (World Bank, 2004). Kemiskinan juga mempunyai kaitan dengan terbatasnya lapangan kerja

dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan bisa dikategorikan miskin dan biasanya tidak mempunyai tingkat kesehatan dan pendidikan yang cukup. Mengatasi persoalan kemiskinan harus bersamaan dengan menyelesaikan persoalan kesehatan pendidikan dan masalah-masalah lain yang secara langsung berkaitan dengan kemiskinan, dengan kata lain harus memakai pendekatan lintas sektor, lintas pelaku dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) metode *Basic needs approach* adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Pendekatan ini bermaksud memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan sisi ekonomi terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Diartikan masyarakat miskin adalah masyarakat yang pendapatan perkapita perbulannya ada di bawah garis kemiskinan. Dihitung dengan presentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Berdasarkan Provinsi Tahun 2017- 2021 (jiwa)

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
DKI Jakarta	393.130	372.260	362.300	496.840	498.290	424.564
Banten	3.774.410	3.539.400	3.375.890	4.188.520	4.004.860	3.776.616
Jabar	4.197.490	3.867.420	3.679.400	4.119.930	3.934.010	3.959.650
DIY	466.330	450.250	440.890	503.140	474.490	467.020
Jatim	4.405.270	4.292.150	4.056.000	4.585.970	4.259.600	4.319.798
Jateng	699.830	668.740	641.420	857.640	852.280	743.982

Sumber: (BPS, 2022).

Penduduk miskin di Indonesia pada periode tahun 2017 hingga tahun 2021. Sementara itu, rata-rata jumlah penduduk miskin Jawa Timur periode 2017-2021 merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, yaitu sebesar 4.319.798 jiwa (Tabel 1.1). Selanjutnya, ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 3.959.650 jiwa, berikutnya Banten dan Jawa Tengah masing-masing 3.776.616 dan 743.982

jiwa. Peringkat kelima DIY dengan rata-rata 467.020 jiwa dan jumlah penduduk miskin paling rendah DKI Jakarta 424.564 jiwa. Data yang telah dipaparkan tabel diatas menyatakan bahwa Jatim mempunyai jumlah penduduk miskin terbesar di bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain oleh sebab itu perlunya penanggulangan yang sesuai supaya angka kemiskinan tersebut segera diatasi.

BPS Jawa Timur (2019) menjelaskan bahwa Jawa Timur menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, dimana tahun 2019 menyentuh angka 4,05 juta jiwa. Tingginya angka kemiskinan inilah yang menempatkan permasalahan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam setiap pembangunan. Walaupun data terbaru menyatakan bahwa di Jawa Timur telah terjadi penurunan persentase jumlah penduduk miskin, namun belum berarti Jawa Timur mengalami perbaikan tingkat kesejahteraan. Kendatipun demikian, berkurangnya jumlah penduduk miskin tersebut layakanya harus diwaspadai, karena berpeluang untuk kembali miskin, ditambah dengan tuntutan global yang mengharuskan seseorang untuk bersaing secara intelektual. Indikator makro pembangunan Jawa Timur sampai tahun 2021 menunjukan arah yang positif dan menjadi prioritas sasaran pemerintah yang masih akan terus ditingkatkan, diantaranya meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks pembangunan manusia (Bappeda Jatim, 2021). Melihat perkembangan ekonomi makro tersebut dan untuk mengetahui lebih jauh pengaruh ekonomi makro terhadap perkembangan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur, maka dalam penelitian ini hanya akan dibahas faktor penyebab kemiskinan berupa karakteristik makro.

Pertumbuhan ekonomi menjadi syarat utama agar angka kemiskinan dapat diturunkan, seperti yang dijelaskan oleh Bank Dunia dalam Laporan Monitoring Global Tahun 2005 bahwa perkembangan ekonomi menjadi inti

jawaban permasalahan kemiskinan dan jawaban untuk pembangunan global. Simpulan dari pernyataan tersebut adalah penurunan angka kemiskinan akan menjadi mustahil jika perkembangan ekonomi tidak terjadi.

Menurut (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2006) mengungkapkan bahwa “pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang negatif dengan jumlah penduduk miskin, maksud dari penjelasan tersebut adalah jika pertumbuhan mengalami pertumbuhan atau kenaikan maka jumlah penduduk miskin akan menurun dan sebaliknya jika pertumbuhan mengalami penurunan maka jumlah penduduk miskin akan mengalami kenaikan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya pertumbuhan ekonomi dilakukan secara cepat dan tepat agar jumlah penduduk miskin bisa segera di atasi.

Jumlah penduduk miskin Jawa Timur periode 2017-2021 berjalan seiring dengan pergerakan laju pertumbuhan ekonomi. Periode 2017-2021 saat laju pertumbuhan ekonomi menurun jumlah penduduk miskin meningkat. Jumlah penduduk miskin meningkat pada tahun 2017-2021 dikarenakan kebijakan pemerintah menaikkan BBM, hal ini berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan, selain pertumbuhan ekonomi juga pembangunan ekonomi. Todaro dan Smith (2006) menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti pembangunan. Pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, papan,

kesehatan, dan perlindungan keamanan. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Ketiga, perluasan pilihanpilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pengangguran merupakan kondisi dari individu manusia yang telah mencapai usia tertentu namun belum juga memperoleh pekerjaan atau bisa juga diartikan sebagai upaya mencari pekerjaan untuk mendapatkan haknya berupa gaji. Umumnya pengangguran dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara banyaknya angkatan kerja (pencari kerja) yang berbanding terbalik dengan banyaknya lapangan pekerjaan. Menurut Lewis proses pembangunan secara khusus ditujukan kepada negara yang tengah dihadapkan dengan permasalahan terkait tenaga kerja yang berlebih. Dalam hal ini negara yang dimaksud yakni negara berkembang, karena adanya ketidaksesuaian yang disebabkan oleh faktor kelebihan tenaga kerja yang pada akhirnya memicu masalah ekonomi berupa modal yang minim dan luas tanah yang digunakan belum cukup memadai. Pengangguran berkaitan erat dengan jumlah penduduk miskin seseorang pada sebuah negara. Seseorang yang memiliki kualitas hidup yang rendah atau miskin dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti: perolehan gaji yang minim,

sarana dan prasarana rumah hunian yang jauh dari kata layak, kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi, dan usia harapan hidup yang relatif singkat, serta sempitnya kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan. Boediono menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pada pertambahan jumlah *output* perkapita dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencapai pembangunan yang berhasil dan syarat wajib agar mengurangi pengangguran.

Indeks pembangunan manusia (IPM) menurut (Khodabakhshi, 2011) merupakan indikator dan faktor vital yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi pada sebuah negara, di mana untuk komponen pembentuk IPM itu sendiri di antaranya yaitu rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan juga pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita. (Todaro, 2000) mengungkapkan jika pendidikan berperan penting dalam perekonomian terkait pemanfaatan dari teknologi terbaru untuk upaya pertumbuhan dan pembangunan negara secara terus-menerus. Keberhasilan pada pendidikan dipengaruhi oleh kesehatan yang memadai. Selain itu, kesehatan juga menjadi syarat utama untuk meningkatkan produktivitas. Pendidikan dan kesehatan merupakan *input* bagi fungsi produksi agregat yang berperan penting pada pertumbuhan dan pembangunan negara. Menurut (Wibisono, 2001) angka harapan hidup memiliki pengaruh yang baik terhadap kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. (Mankiw, 2003) mengungkapkan jika sebuah negara memiliki atensi lebih terhadap aspek pendidikan warga negaranya, *ceteris paribus*, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negaranya.

Kemiskinan suatu daerah bisa dipengaruhi dari tingkat Kesehatan penduduk daerah tersebut. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata lama

tahun yang akan dijalani oleh seorang bayi untuk hidup pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dapat dijadikan suatu alat evaluasi bagi pemerintah untuk menilai kesejahteraan suatu penduduk di daerah tertentu dan bagaimana cara meningkatkannya. Angka harapan hidup yang kecil harus diikuti dengan program pembangunan Kesehatan penduduk dan pemberantasan jumlah penduduk miskin lewat program social. Pendidikan adalah senjata utama dalam proses pembangunan suatu bangsa, jika dalam suatu daerah yang bangsanya tidak mempunyai Pendidikan yang baik maka tinggal menunggu waktu untuk daerah tersebut mengalami kemerosotan. Kemerosotan terjadi dikarenakan Pendidikan memiliki sangkut paut dengan pembangunan karakter suatu bangsa dan bagaimana bangsa tersebut mempertahankan jati dirinya, jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan berakibat kepada kebodohan dan kebodohan identik dengan kemiskinan. Pembangunan manusia adalah upaya untuk memperluas opsi individu dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok manusia, misalnya: pendidikan, kesehatan, dan kemampuan konsumsi. Suatu daerah yang pembangunan manusianya berkualitas unggul, tentunya memiliki masyarakat miskin dengan persentase rendah.

Populasi penduduk juga menjadi faktor yang berpengaruh pada angka kemiskinan. Kualitas penduduk yang baik dan diikuti dengan jumlah populasi tinggi dapat dijadikan modal yang baik untuk pembangunan suatu daerah, namun akan berbanding terbalik jika hal tersebut diikuti oleh kualitas penduduk yang buruk karena bisa menjadi beban dalam pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan penduduk juga memiliki konsekuensi negative seperti dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional.

(Smith, 2006). Penelitian (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2006) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif pada angka kemiskinan, jika angka jumlah penduduk naik maka angka kemiskinan juga mengikuti kenaikan.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi,Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2021

Tahun	Pertumbuhan ekonomi (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tingkat Pengangguran (%)
2017	5,46	70,87	7,34	4,00
2018	5,47	70,97	7,39	3,91
2019	5,53	71,18	7,59	3,82
2020	-2,33	71,30	7,78	5,84
2021	3,57	71,39	7,88	5,74

Sumber: (BPS, 2022).

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021, cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia (enlarging choice) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah (IPM, 2007).

Permasalahan kemiskinan tidak bisa dihilangkan dari permasalahan setiap daerah. Faktor-faktor yang sudah di bahas sebelumnya menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di pengaruhi oleh beberapa hal mulai dengan pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata rata lama sekolah atau

pendidikan, dan tingkat pengangguran di suatu daerah. Pada tabel yang sudah ditampilkan menunjukkan terjadinya kenaikan dan penurunan jumlah angka kemiskinan oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut, maka peneliti merumuskan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Rata Rata Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021?
2. Apakah Rata-rata Lama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021?
3. Apakah Angka Harapan Hidup Sekolah berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021?
4. Apakah Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021?
2. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021?
3. Untuk mengetahui pengaruh angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021?
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021?
5. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup dan Rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2017-2021?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diharapkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin pada suatu daerah terutama kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur, serta juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

